

L A P O R A N

REALISASI PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL TRIWULAN I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014

A. Rencana Persetujuan Penanaman Modal

Pada tahun 2014 ini, Pemerinth Provinsi Kalimantan Timur melalui BPPMD telah mentargetkan persetujuan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu sebesar Rp 25 – 27 triliun. Hal ini sudah mempertimbangkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, sehingga penerbitan izin penanaman modal pada Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Utara tidak lagi menjadi kewenangan BPPMD. Selain itu, mempertimbangkan pula kondisi ekonomi dan sosial politik.

Kondisi ekonomi makro Kalimantan Timur pada tahun 2014 ini ditandai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari tahun 2013 sebelumnya; dan khususnya untuk triwulan I tahun berjalan sekarang ini pertumbuhan dimaksud (dengan memperhitungkan migas) hanya mencapai 2,44 % (y to y) atau 0,72 (q to q) -, termasuk Provinsi Kalimantan Utara – sehingga ini berada dibawah pertumbuhan ekonomi secara nasional, yang mencapai 5,21 (y to y) atau 0,95 % (q to q). Kondisi sosial politik, yang ditandai dengan gejolak sosial terhadap pemberlakuan UMP pada beberapa Provinsi di Pulau Jawa, tidak memberikan pengaruh berarti di Kalimantan Timur. Namun dari aspek politik – terkait dengan akan diselenggarakannya Pemilu Legislatif pada bulan April mendatang, yang selanjutnya diikuti dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di bulan Juli; tentunya akan berdampak terhadap sikap para investor/calon investor yang cenderung bersifat wait & see – menunggu komitmen politis terhadap arah kebijakan ekonomi 5 tahun mendatang.

Namun demikian, sikap optimis tetap melandasi perkiraan prospek investasi, karena Kalimantan Timur masih memiliki keunggulan komparatif berbasis pemanfaatan sumber daya alam, disamping pesatnya kegiatan pembangunan infrastruktur dasar, berupa jalan/jembatan, kelistrikan, air bersih serta pelabuhan laut dan udara. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat mensisihkan dana APBD untuk membiayai proyek-proyek infrastuktur, sehingga berkorelasi terhadap upaya menciptakan efisiensi pembiayaan usaha (daya saing).

Persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan berupa izn prinsip, izin usaha dan izin merjer. Khususnya untuk izin prinsip ataupun izin usaha dapat merupakan izin untuk pertama kalinya atau merupakan perubahan atas izin sebelumnya, disamping kemungkinan terjadinya perluasan. Peningkatan persetujuan ini merupakan indikasi terhadap peningkatan investasi di daerah dalam bentuk PMDN yang menjadi kewenangan BPPMD untuk menerbitkannya (tidak termasuk industri strategis atau lintas Provinsi), sementara untuk PMA tetap menjadi kewenangan BKPM; sedangkan izin non penanaman modal lebih bersifat administratif.

B. Realisasi Persetujuan Penanaman Modal

Sampai dengan akhir triwulan I ini BPPMD telah menerbitkan persetujuan yang mencapai jumlah 6 izin dengan nilai investasi sebesar Rp 3,75 triliun atau 15 % dari target minimal, yaitu Rp 25 triliun, dengan jumlah tenaga kerja yang akan diserap sebanyak 4.194 orang WNI. Dari ke-6 izin tadi terbagi dalam :

- a. 3 (tiga) izin prinsip ;
- b. 1 (satu) izin prinsip perubahan ;
- c. 1 (satu) izin usaha ;
- d. 1 (satu) izin usaha perluasan.

Keseluruhan izin diselesaikan sesuai SOP – sebagai wujud dari komitmen untuk memberikan pelayanan prima. Sebagaimana disebutkan diatas, dari 6 izin tersebut 2 diantaranya merupakan izin usaha, sehingga ini menunjukkan bahwa perusahaan PMDN bersangkutan sudah mulai beroperasi, dan sudah menyerap tenaga kerja formal seperti diusulkan.

1. Realisasi Berdasarkan Lokasi

Apabila dirinci lebih lanjut berdasarkan sebarannya, maka persetujuan penanaman modal yang telah diterbitkan BPPMD hanya ada di 5 Kabupaten/Kota, dimana *Kabupaten Paser Penajam Utara* mampu menyerap jumlah persetujuan penanaman modal hingga mencapai 33,39 %, kemudian diikuti oleh *Kabupaten Kutai Kartanegara* yang mencapai 25,03 %.

Tabel 1
Realisasi Persetujuan Penanaman Modal (PMDN) Berdasarkan Sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Pada Triwulan I Tahun 2014

No	Kab/Kota	Jumlah Proyek	Nilai Proyek		Serapan Tenaga Kerja (org)
			(Rp)	%	
1	Balikpapan	1	30.358.922.536	0,81	124
2	Kutai Kartanegara	1	939.618.165.126	25,03	250
3	Kutai Timur	1	647.338.470.000	17,24	1.550
4	P a s e r	2	883.061.786.896	23,52	2.120
5	Paser Penajam Utara	1	1.253.660.000.000	33,39	150
T o t a l		6	3.754.037.344.558	100,00	4.149

Sumber : Diolah dari data PTSP BPPMD Provinsi Kaltim.

Namun demikian, dilihat dari *penserapan tenaga kerja-nya Kabupaten Paser* relatif lebih besar dibandingkan lainnya, yaitu mencapai 2.120 orang atau 51,10 % dari keseluruhan tenaga kerja yang terserap, yaitu 4.149 orang – hanya dari 1 paket proyek PMDN. *Kabupaten Kutai Timur* menempati urutan ke-2, yaitu sebanyak 1.550 orang dari 1 paket proyek PMDN.

Jumlah persetujuan penanaman modal, dalam hubungannya antara nilai proyek dengan penyerapan tenaga kerja tidak selalu berbanding lurus, bergantung pada sektor-nya dan sifat permodalannya; apakah labour intensive atau capital intensive. Sektor ekonomi primer, khususnya pertanian dalam arti luas cenderung menyerap banyak tenaga kerja. Faktanya menunjukkan bahwa di Kabupaten Paser dan Kutai Timur memiliki potensi untuk pengembangan sub sektor perkebunan, sehingga prospek investasi di sub sektor perkebunan pada ke-2 Kabupaten tadi akan membutuhkan banyak tenaga kerja formal/non formal.

2. Realisasi Berdasarkan Sektor Usaha

Pada triwulan I ini, berdasarkan persetujuan penanaman modal yang telah dikeluarkan BPPMD menunjukkan bahwa sektor ekonomi sekunder, khususnya *Sub Sektor Industri Chip, Pulp, Wood Panel, Wood Pallet dan Perdagangan Ekspor Hasil Kehutanan*, relatif lebih dominan dibandingkan sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai Rp 1,25 triliun atau 33,39 % dari keseluruhan persetujuan penanaman modal yang telah dikeluarkan pada triwulan I tahun 2014, dengan jumlah proyek sebanyak 1 paket (PT. Agra Bareksa Indonesia). Selanjutnya diikuti oleh sektor ekonomi primer, terutama dari *Sub Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Industri Pengolahan*, dengan 2 paket proyek yang nilainya berjumlah Rp 1,22 triliun (32,79 %) – mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 3.550 orang atau 85,56 % dari tenaga kerja yang terserap keseluruhannya.

Hal cukup menarik adalah di *Sub Sektor Lainnya* pada sektor ekonomi sekunder, yaitu *Industri Ubi Kayu* – sudah ada indikasi mulai berkembangnya industri ini; sejalan dengan bertambahnya luasan tanaman ubi kayu, terutama yang diupayakan masyarakat secara mandiri. Industri ini mulai berkembang di Kabupaten Paser oleh PT. United Sasamba Plantation, dan diharapkan industri yang sama akan berkembang di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara,

Tabel 2

Realisasi Persetujuan Penanaman Modal (PMDN) Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Pada Triwulan I Tahun 2014

No	Sektor/Sub Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Proyek		Serapan Tenaga Kerja (org)
			Rp	%	
I Sektor Primer					
1.1	Tanaman Pangan, Perkebunan & Industri Pengolahan	2	1.229.900.256.896	32,76	3.550
II Sektor Sekunder					
2.1	Industri Chip, Pulp, Wood Panel, Wood Pallet & Perdagangan Ekspor Hasil Hutan	1	1.253.660.000.000	33,39	150
2.2	Industri Logam	1	30.358.922.536	0,81	124
2.3	Industri Lainnya : - Industri Ubi Kayu	1	300.500.000.000	8,00	120
III Sektor Tersier					
3.1	Litrik, Gas & Air - Industri Listrik	1	939.618.165.126	25,03	250
T o t a l		6	3.754.037.344.558	100,00	4.194

Sumber : Diolah dari data PTSP BPPMD Provinsi Kaltim.

Sektor ekonomi tersier, untuk saat ini hanya ada 1 persetujuan penanaman modal, yaitu pada *Sub Sektor Listrik, Gas dan Air* – yang diajukan oleh PT. Cahaya Fajar Kaltim berupa izin usaha perluasan, dengan nilai persetujuan sebesar Rp 939,62 milyar (25,03%). Pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU) yang berlokasi di Desa Embalut (Kutai Kartanegara) ini merupakan bagian dari kelistrikan Sistem Mahakam, sehingga perluasan yang dilakukan akan menambah pasokan tenaga listrik.

C. Non Perijinan

Disamping menerbitkan persetujuan penanaman modal berupa izin prinsip, izin usaha dan merjer – BPPMD menerbitkan pula non izin dibidang penanaman modal dan dibidang teknis, dimana pada triwulan I ini terdapat 3 non izin, yaitu : *Pertama*, 1

non izin dibidang penanaman modal dari PT. Sims Jaya Kaltim (jasa pertambangan) - Paser, yang merubah NPWP-nya. *Kedua*, 2 non izin dibidang teknis terkait dengan izin operasional Rumah Sakit tipe B di Kota Balikpapan, yaitu RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan RS Khusus Bersalin Sayang Ibu.

D. Upaya Tindaklanjut

Memasuki pelaksanaan triwulan II tahun 2014, bersamaan dengan akan dilaksanakannya PEMILU Legeslatif, diperkirakan berdampak terhadap pengajuan persetujuan penanaman; dan seperti telah dikatakan sebelumnya ada kecenderungan para investor/calon investor bersikap wait and see, sehingga sebagai langkah antisipasinya diperlukan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, terutama dari gejala sosial politik, dimana peran BPPMD harus mampu memberikan informasi kondisi terkini terhadap situasi daerah melalui website, disamping meningkatkan pelayanan perizinan; dalam konteks tersebut telah dilakukan langkah-langkah tindaklanjut sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem aplikasi (website) yang menggabungkan SPIPSE-SIPID-SIMPEDAL, dimana salah satu konten-nya memuat *pendaftaran on line*. Konten dimaksud dapat dimanfaatkan sebagai konsultasi teknis bagi para investor/calon investor pada saat akan melakukan pendaftaran penanaman modal. Tanpa harus melakukan kontak langsung. Ini sangat membantu dalam menekan biaya dan dapat menghemat waktu.
2. Menerbitkan Peraturan Kepala BPPMD Provinsi Kaltim No. 503/268/BPPMD-III/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP di BPPMD Provinsi Kaltim, dimana didalamnya mengatur lama waktu proses perizinan yang tidak melebihi 5 hari kerja.